

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amal, Ichlasul, 2007, *Teori-teori Mutahir Partai Politik*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Yayasan Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, dalam Zainal A.M. Husein (ed), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Aziz, Noor M., 2009, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta.
- Dahl, Robert A., 1971, *POLYARCHY: Participation and Opposition*, Yale University Press.
- Gaffar, Afan, 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Habermas, Jurgen, 1984, *Theory of Communicative Action*, Boston, Beacon.
- Harjono, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Himidi, Jazim, 2010, *Rethinking Penyelenggaraan Pilkada Yang Demokratis dan Partisipatif*, dalam *Konstitusionalisme Demokrasi (sebuah diskursus tentang pemilu, otonomi daerah dan mahkamah konstitusi sebagai kado untuk “sang Penggembala” Prof. A. Mukhtie Fadjar)*, *In Trans Publishing*, Malang.
- Kartawidjaja, Pipit R., dan Mulyana W. Kusumah, 2002, *Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden: Suatu Studi Banding*, KIPP Eropa, FriedrichNaumann-

- Stiftung (FNS) dan Indonesian Society for Democracy and People Employment (INSIDE), Jakarta.
- Katz, Richard S., dan William Crotty, 2014, *Handbook Partai Politik*, Nusa Media, Bandung.
- Lutfi, Mustafa, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta.
- Marijan, Kacung, 2011, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- McKee, A., 2009, *The Public Sphere: An Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nadir, Ahmad, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes.
- Prianto, Andi Luhur, dkk, 2021, *Demokrasi Lokal, dan Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal (Rapid Assessment Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa 2020)*, CV. Subaltern Inti Media, Gowa.
- Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rosanti, Ratna, 2021, *Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2020*, Bak Cendawan di Musim Hujan, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rusnaedy, Zaldi, 2020, *Dinasti Politik di Aras Lokal*, Deepublish, Yogyakarta.
- Rusnaedy, Zaldy, 2020, *Dinasti Politik di Aras Lokal*, Deepublish, Yogyakarta.
- Schumpeter, Joseph A., 2003, *Capitalism, Sosialism, and Democracy*, London – New York, This edition published in the Taylor & Francis e-Library.
- Sisk, Timothy D., 2002, *Demokrasi di Tingkat Lokal*, Buku Panduan International IDEA Seri 4, AMEETPRO (Edisi Bahasa Indonesia 2002), Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta.
- Suharizal, 2011, Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Bahan Kuliah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Supriyanto, Didik, dan Lia Wulandari, 2012, Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan, Perludem, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 2015, Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu, The Partnership for Governance Reform (Kemitraan), Jakarta.
- Sutisna, Agus, 2017, Demokrasi Elektoral Dan Pemilukada Langsung: Tinjauan Teori Dan Sisi Gelapnya, Political Science Program Department of Politics and Civics Education Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Zaman, Rambe Kamarul, 2016, Perjalanan Panjang Pilkada Serentak, PT. Mizan Publika, Jakarta.

Jurnal

- A., Gaffar, "Politik Lokal dan Pilkada di Indonesia", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 45, No. 2, 2018.
- A., Saweho Grendy A. dkk., "Calon Tunggal dan Pilkada", *Jurnal Politico*, Vol. 11 No. 2, 2022.
- Abadi, Songga Aurora, "Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Abdullah, "Lunturnya Hak Politik Kandidasi Calon Kepala Daerah dalam Kekuasaan Partai Akibat Ongkos Pemilu yang Mahal", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 10, 2024.

- Aminuddin, M. Faishal, "Matc-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009," *Jurnal Politik*, Vol. I, No. I, 2015.
- Aminudin, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 12, 2015.
- Arfiani, dan Syofiarti, "Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Unes: Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 4, 2024.
- Artadi, Ibnu, Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2006.
- Astuti, Budi, dan M. Rusdi Daud, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Asyadi, Maskup, "Irasionalitas Persyaratan Pencalonan Perseorangan Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Cakrawala*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Auzatas, Fery dkk., "Tinjauan Terhadap Demokrasi Dalam Konteks Masyarakat: Literatur Riview Sistematis", *JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Bahtiar, M. Teguh Setyadi, "Interaksi Partai Politik Dan Pengusaha Dalam Rekrutmen Pencalonan Kepala Daerah Di Indonesia", *Jurnal JSPM*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Chandra, Yenny, "Assessing the Impact of Decentralization on the Quality of Indonesian Democracy", *Global Strategis*, Vol. 18, No. 2, 2004.
- Diamantina, Amalia Diamantina, dan Lita Tyesta, "Quo Vadis Penegakan Hukum Politik Uang: Potret Pilkada Serentak 2020 Di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 3, 2022.
- Ekowati, Endah Yuli, "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada", *Jurnal Transformative*, Vol. 5, No. 1, Mei 2019.
- Erniyanti, "Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 2, 2018.

- Faiz, Pan Mohammad, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009.
- Faturohman, Deden, "Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia", *Jurnal Legality*, Vol. 12, No. 1, 2005.
- Faturrahman, Muhammad, "Sistem Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik", *Jurnal JAPS*, Vol. 5, No. 3, 2024.
- Femiliona, Ferdana, "Keadilan Pemilu Bagi Calon Perseorangan Kasus Pilkada Sukoharjo 2024", *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Hannan, Abd, "Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer", *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Hendra, Rahmad, "Demokrasi Dalam Pemilukada", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Henry, Shari, "Tip O'Neill Was Right: The Power of Local Politics", *The Political Librarian*, Vol. 7. 2, 2024.
- Husain, Najib dkk., "Analisis Potensi Calon Independen Versus Calon Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020", *Journal Publicuho*, Vol. 6, No 1, 2023.
- Hutomo, Priyo, dan Markus Marselinus Soge, Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2023.
- Iqbal, Mohamad, "Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol", *Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 6, 2016.
- Irawan, I Ketut Putra, "Political Reform and Regional Politics in Indonesia", *JSTOR*, Vol. 39, No. 4, 1999..
- Kartiko, Galuh, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, 2009.
- Khoiriyah, Melisa Elmi, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti & Raesitha Zildjianda, Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan

- Kesejahteraan di Indonesia, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Legowo, Tommi A., “Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance Dan Masa Depan Otonomi Daerah”, *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 6, No. 4 Tahun 2015.
- Lindawati, Debora Sanur, “Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014”, *Jurnal Politica*, Vol. 4, No. 2, 2013.
- Makhasin, Luthfi, “Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19, No. 3, 2016.
- Mamonto, Kharis Syahrial Alif, dan Joko Setiyono, "Demokratisasi Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah", *Rechtidee*, Vol. 16, No. 2, 2021, hlm. 211.
- Mamonto, Kharis Syahrial Alif, dan Joko Setiyono, “Demokratisasi Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Rechtidee*, Vol. 16, No. 2, 2021.
- Mappasiling Andi Ahmad, dan Supriyadi, “Implikasi Yuridis Terhadap Calon Independen dalam Pilkada Menurut Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah”, *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Muthhar, Mohammad Asy’ari, “Membaca Demokrasi Deliberatif Jorgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia”, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Muttaqien, AL., “Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Nazriyah, R., “Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Nge, Herri Junius, Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1, No. 1, 2018.

- Noor, Firman, Pilkada, “Peran Partai Politik, Dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng Dan Jatim (2017-2018)”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Noorsanti, Inggal Ayu, dan Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Nopyandri, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011.
- Nurhalim dan Icha Cahyaning Fitri, “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Indonesian Journal of Law Justice*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Nurrahmah, Siti, “Gagasan Mencegah Timbulnya Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak dalam Perpektif Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6 Nomor 1, 2019.
- Pratama, Zamzami dan Utami, “Ambang Batas (Electoral Threshold) Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Demokrasi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024)”, *Jurnal Dinamika*, Vol. 31, No. 1, 2025.
- Pratiwi, Endang, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022.
- Prihatmono, Achmad Ronggo, dan Kris Nugroho, “Pilkada Calon Tunggal Di Kabupaten Pati Tahun 2017: Suatu Tinjauan Oligarkisme Parpol”, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 6 ,No. 1, 2020, hlm. 35.
- Proborini, Astrid Budi, dan Nurhidayati, “Komunikasi Dan Peranan Kpu Kota Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020”, *Jurnal Reformasi*, Vol. 12, No. 1, 2022.
- Putra, I Gusti Lanang Surya, dkk., Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang

- Memutarkan Lagu Dan/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja), *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, 2023.
- Radbruch, Gustav, 1975, *Rechtsphilosophie*, Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, hal 177. Lihat juga dalam Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, 2014.
- Rahman, Rofia Aulia, dkk., Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, 2022.
- Ramadhan, Febriansyah, dkk, "The Phenomenon of Dynastic Politics Following Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015", *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 23, No. 2, 2021.
- Razak, Askari, Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Rohma, Elva Imeldatur, "Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bongers, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 16, No. 1, 2024.
- RS, Iza Rumesten, Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, 2016.
- Sabrina, dkk., "Rekonstruksi Ambang Batas Maksimal Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia", *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Saihu, Mohammad, "Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020", *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol. 7 No .1, 2021.
- Samaragtahira, Sekar Ar-Ruum, "Partisipasi Politik dalam Konsep Kedaulatan Rakyat", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 3, 2023.
- Santoso, Agus Budi, "Eksistensi Dan Problematika Calon Independen dalam Pemilukada Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015", *REFLEKSI HUKUM*, Vol. 1, No. 2, 2017.

- Santoso, Rudi dkk., “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih”, *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Sirait, Adi Syahputra, Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Al-Maqqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Solihah, Ratnia, “Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia”, *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Sulardi, dan Tri Sulistyaningsih, “Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2017.
- Susanto, Mei, “Model Alternatif Pendanaan Partai Politik”, *Jurnal Kajian*, Vol. 22, No. 3, 2017.
- Suteki, “Hegemoni Oligarki Dan Ambрукnya Supremasi Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Suyatno, “Pemilihan Kepala Daerah Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia”, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Syawawi, Reza, dan Khoirunnisa Nur Agustyati, “Membunuh Demokrasi Lokal” Mengembalikan Pemilihan Gubernur Kepada DPRD Provinsi”, *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, Edisi 4, 2021.
- Tanjung, Muhammad Anwar, dan Retno Saraswati, “Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 3, 2019.

- Tanjung, Muhammad Anwar, dan Retno Saraswati, “Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 3, 2019.
- Umami, Khairul, “Implementasi UUD 1945 Pasal 28 D ayat (3) Tentang Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah”, *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 13, No. 1, 2023.
- Wakhid, Ali Abdul, dkk., “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 13, No. 02, 2017.
- Wibisono, Yusuf, “Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal”, *Jurnal Ilmudan Budaya*, Vol. 40, No. 56, 2017.
- Wilujeng, Sri Rahayu, “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berbangsa Melalui Budaya Demokrasi”, *HUMANIKA*, Vol. 19, No. 1, 2024.
- Zainuddin, Evi Oktarina, dan Soni Irawan, “Optimalisasi Peran Pengawasan Dprd Terhadap, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dalam Bidang Kesehatan”, *Nova Juris: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Zubair, “Pemilihan Kepala Daerah Bagi Calon Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Februari 2021.
- Zuhro, R. Siti, "Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia", *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2018.

Internet

- Anggraeni, Titi, “Calon Tunggal di Tengah Pragmatisme dan Hegemoni Elite Politik”, <https://law.ui.ac.id/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik-olehtiti-anggraini-s-h-m-h/>, diakses pada 6 Juli 2025.
- BBC News Indonesia, “Tujuh hal yang perlu Anda ketahui tentang Pilkada 2015”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151208_indonesia_pilkada_explainer, diakses 04 Maret 2025.
- Haq, Arina Zulfa Ul, <https://news.detik.com/berita/d-8081607/mantan-wali-kota-semarang-mbak-ita-divonis-5-tahun-penjara>, diakses 01 Desember 2025.

Helen, Zenis, “Musim Kemenangan Calon Tunggal di Pilkada”,
<https://news.detik.com/kolom/d-5297551/musim-kemenangan-calon-tunggal-di-pilkada>, diakses 04 Maret 2025.

Khalisah, Farah, “Calon Independen: Mampu Atau Tidak?”,
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/2457-2/>, diakses 17 Juni 2025.

Lazuardi, “Calon Tunggal di 38 Daerah, Kegagalan Partai Politik Calonkan Kadernya Sendiri”, <https://ugm.ac.id/id/berita/calon-tunggal-di-38-daerah-kegagalan-partai-politik-calonkan-kadernya-sendiri/>, diakses 06 Januari 2025.

Muliawati, Anggi, "Daftar 41 Daerah dengan Calon Tunggal pada Pilkada 2024",
<https://news.detik.com/pilkada/d-7526768/daftar-41-daerah-dengan-calon-tunggal-pada-pilkada-2024>, diakses 04 Maret 2025.

Nugraheny, Dian Erika, dan Krisiandi, "Ini Daftar 25 Daerah dengan Bakal Paslon Tunggal di Pilkada 2020",
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/14274881/ini-daftar-25-daerah-dengan-bakal-paslon-tunggal-di-pilkada-2020?page=3>, diakses 04 Maret 2025.

Nugroho, Bagus Prihantoro, “Ini 9 Calon Tunggal yang Juga Petahana di Pilkada Serentak 2017”, <https://news.detik.com/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga-petahana-di-pilkada-serentak-2017>, diakses 04 Maret 2025.

Ridwan, Muhammad, “Pilkada Serentak 2018: Ada 16 Calon Tunggal, Jumlah Paslon & Pemilih”,
<https://kabar24.bisnis.com/read/20180626/15/809737/pilkada-serentak-2018-ada-16-calon-tunggal-jumlah-paslon-pemilih>, diakses 04 Maret 2025.

Wijayanti, Titik, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/06/197.pdf>, diakses 01 Desember 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dalam perkara pengujian Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tesis dan Disertasi

Junaidi, 2023, Fenomena Calon Tunggal Yang Didukung Mayoritas Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Dwanda Julisa Sistyawan, 2017, Penerapan Demokrasi Pancasila Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015), Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.